



## PENERAPAN SMARTCARD MELALUI WEBSITE SIKENAL PADA TERMINAL TIPE B TERHADAP UJI KELAYAKAN BUS ANTARKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Emalia Tarisha Putri<sup>1</sup>, Moh. Rizaldi Firmanda<sup>2</sup>, Revanza Oktavia  
Widianingrum<sup>3</sup>, Sulton Widhyana Afandi<sup>4</sup>, Wiredarme<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>1</sup>[30.0795@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0795@praja.ipdn.ac.id), <sup>2</sup>[30.0823@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0823@praja.ipdn.ac.id), <sup>3</sup>[30.0842@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0842@praja.ipdn.ac.id), <sup>4</sup>[30.0855@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.0855@praja.ipdn.ac.id),  
<sup>5</sup>[wirwiredarme@yahoo.com](mailto:wirwiredarme@yahoo.com)

### Info Artikel :

Diterima : 15 Juli 2022

Disetujui : 20 Juli 2022

Dipublikasikan : 25 Juli 2022

### ABSTRAK

Penggunaan teknologi dibutuhkan dalam pelayanan publik. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pemerintah sebagai penyedia pelayan publik harus terus melakukan pembaruan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satu penerapan e-government yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah dengan penggunaan *website* Sikenal (Sistem Kinerja Terminal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *website* Sikenal melalui smartcard pada Terminal Tipe B di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 27 Terminal Tipe B terdaftar di *webstie* Sikenal sehingga hal tersebut mempermudah kerja pemerintah untuk mengetahui layanan informasi mobilitas bus yang ada di Jawa Timur. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah dari 27 Terminal Tipe B hanya dua terminal yang dapat menggunakan smartcard yaitu Terminal Anjuk Ladang dan Terminal Kertajaya Mojokerto.

**Kata Kunci :**  
Pelayanan  
Publik,  
Sikenal,  
Mobilitas Bis,  
Smartcard

### ABSTRACT

*The use of technology is needed in public services. As time goes by then the government as a public service provider must continue to update the service to the community. One of the implementations of e-government carried out by the Department of Transportation for the Province of East Java is through the use of the Sikenal website (System Performance of Terminal). The observation aims to find out the application of the Sikenal website through smartcard at terminal type B in east java. This research used this type of research descriptive qualitative method. The results of this study indicate that of the 27 terminals type B is registerd ith Sikenal website so that it makes it easier for the government to work for find out bus mobility information services in east java. The obstacles facing government is out of 27 terminals type B only 2 terminals can use smartcard are anjuk ladang terminal and kertajaya terminal.*

**Keywords :**  
Public Service,  
Sikenal, Bus  
Mobility,  
Smartcard

## PENDAHULUAN

Era digitalisasi merupakan keadaan yang setiap kegiatan dipermudah dengan adanya teknologi. Society 5.0 merupakan konsep yang dirancang oleh pemerintah Jepang dalam dokumen 5<sup>th</sup> Science dan Technology Basic Plan (Fakuyama, 2018). Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi melalui pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0. Saat ini, Indonesia telah memasuki era society 5.0 yang mana manusia dituntut hidup berdampingan dengan teknologi. Dalam era ini masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan kasus dengan berpikir kritis dan memiliki kreativitas.

Menurut Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, perbedaan revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 tidak jauh. Revolusi industri 4.0 mengarah pada pemanfaatan kecerdasan buatan sedangkan era society 5.0 lebih terfokus pada komponen manusianya. Dalam era society 5.0 masyarakat difokuskan pada system HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) dengan berpikir secara berjenjang dan sistematis dalam pelaksanaannya. Ini dinamakan sebagai teknik berpikir tingkat tinggi yang diharapkan mampu hadir sebagai konsep dari pemanfaatan teknologi di Revolusi Industri 4.0 dengan tetap memunculkan sisi kemanusiaan sebagaimana kodrat manusia. Pemerintah berperan penting dalam terwujudnya era society 5.0 sesuai dengan konsep yang ada guna keberlangsungan salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan publik. Ditandai dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang mempengaruhi system kerja dari pemerintahan. Hal ini disebut sebagai digital government atau *e-government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya. Melalui pemanfaatan teknologi yang lahir pada masa revolusi industri 4.0 pada akhirnya digital government dinilai mampu menciptakan society 5.0 secara berdampingan dengan manusia sebagai alat untuk memecahkan setiap permasalahan (Ellitaan,2020).

Digital government berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang berpotensi mempercepat penentuan kebijakan karena dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mudah. Gupta, Dasgupta, & Gupta (2008) dalam kajiannya menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga pemerintahan dapat meningkatkan kualitas kerjasama antara organisasi dengan pegawainya. Digital government sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengimbangi adanya perkembangan teknologi dimana setiap pelayanan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara online melalui aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh tiap instansi pemerintah. Pengembangan aplikasi pelayanan publik sendiri bertujuan untuk meminimalisir salah satu patologi birokrasi atau penyakit birokrasi yaitu pelayanan yang berbelit-belit. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang merujuk dan berpotensi merugikan negara dan masyarakat seperti praktik korupsi yang menjadi hambatan bagi jalannya birokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk implementasi digital government dalam bidang perencanaan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota maju di Provinsi Jawa Timur seperti *e-budgeting* dan *e-project* serta bidang kepegawaian seperti pengukuran kinerja dan kenaikan pangkat.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Potensi jumlah penduduk yang banyak memberikan dampak yang signifikan pada mobilitas masyarakat. Tingginya mobilitas

yang terjadi menuntut pemerintah untuk menambah kuantitas sarana prasarana penunjang transportasi.

Transportasi berada dibawah kendali Dinas Perhubungan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Di era digital seperti saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga berupaya mengembangkan segala bentuk pelayanannya berbasis digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Perhubungan membuat sebuah aplikasi bernama “Sikenal ( Sistem Kerja Terminal )”. Sistem Kerja Terminal atau Sikenal ini merupakan sebuah aplikasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur di Bidang Angkutan dan Keselamatan berisikan tentang data dan informasi tentang mobilitas bus baik seperti adminitrasi maupun teknis bus. Sikenal ini berfungsi sebagai pemantau mobilitas bus yang berada di Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan Pemerintah Dinas Perhubungan dalam menampilkan data secara jauh. Namun, Aplikasi Sikenal ini masih memuat data pada satu jenis terminal yaitu Terminal Tipe B. Terminal Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

Pemerintah semakin berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang dibuktikan dengan adanya *SmartCard*. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan *SmartCard* pada kendaraan bus di Terminal Tipe B Anjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk. Terminal Anjuk Ladang adalah salah satu terminal yang ada di Jawa Timur dengan kualitas baik bangunan, pelayanan, dan sarana prasarana terbaru dan terbaik.

Melalui inovasi baru *Smartcard* ini, petugas dapat mengetahui data pergerakan atau perjalanan kendaraan dan penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan yang terintegrasi dan terhubung terminal se-Jawa Timur. System *SmartCard* ini menjamin ketepatan waktu perjalanan bus baik kedatangan maupun keberangkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *website* Sikenal melalui *SmartCard* terhadap uji kelayakan bus antarkota di provinsi Jawa Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, diskusi terfokus, dan dokumen. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak penguji pada uji kelayakan bus pada salah satu terminal. Observasi dilakukan dengan meninjau dan melakukan kerja lapangan terhadap salah satu terminal. Selanjutnya diskusi terfokus dilakukan dengan melakukan diskusi dengan seluruh anggota kelompok untuk menghindari pemaknaan yang salah setiap peneliti. Dokumen berupa informasi yang diperoleh dari fakta dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan *Smartcard* Melalui *Website* Sikenal pada Terminal Tipe B Terhadap Uji Kelayakan Bus Antarkota di Provinsi Jawa Timur**

Adanya transportasi umum mempermudah masyarakat dalam bermobilitas baik jarak dekat maupun jauh. Dengan adanya transportasi umum pula dapat mengurangi angka kemacetan yang kerap terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Salah satu transportasi umum yang sering digunakan masyarakat adalah bus. Tujuan dari adanya transportasi umum adalah untuk mengurai kemacetan dan

mengurangi polusi yang disebabkan oleh padatnya jumlah kendaraan pribadi sehingga dapat mencapai estimasi yang optimal untuk sampai ke tujuan.

Tingginya kebutuhan mobilitas yang ada di Provinsi Jawa Timur membuat Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah terminal yang cukup banyak untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya untuk melakukan mobilitas. Terminal di Jawa Timur sendiri hingga saat ini berjumlah sebanyak 27 terminal dengan jenis terminal Tipe B dimana semua terminal tersebut dikelola dan dibawah langsung oleh pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi darat di Jawa Timur khususnya Bus antar kota dan antar provinsi. Menimbang dari kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur yang masih kurang tertib dalam penggunaan transportasi umum, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengurangi terjadinya ketidaktertiban tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang serba digital seperti saat ini. Salah satu bentuk upaya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah ketertiban yang sering terjadi adalah dengan membuat sebuah aplikasi bernama Sikenal (Sistem Kerja Terminal).

Sikenal atau yang biasa disebut dengan Sistem Kinerja Terminal merupakan *website* yang dibuat dan diaplikasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang berfungsi untuk mengetahui mobilitas bus yang berada di Terminal Tipe B Provinsi Jawa Timur baik dalam masalah administrasi maupun masalah uji kelayakan bus secara teknis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk masalah administrasi ini dapat dilakukan uji kelayakan oleh kasat mata. Sedangkan uji kelayakan teknis harus dilakukan oleh tim penguji atau PPNS yang ada di wilayah terminal tersebut. Berikut adalah syarat uji kelayakan baik administrasi maupun teknis bus.

Unsur Administrasi :

1. Kartu Uji/STUK
2. KP. Reguler
3. KP. Cadangan (untuk kendaraan cadangan)
4. SIM Pengemudi

Unsur Teknis Utama :

1. Sistem Penerangan
  - (a) Lampu Utama Kendaraan Dekat
  - (b) Lampu Utama Kendaraan Jauh
  - (c) Lampu Petunjuk Arah Depan
  - (d) Lampu Petunjuk Arah Belakang
  - (e) Lampu Rem
  - (f) Lampu mundur
2. Sistem Pengereman
  - (a) Kondisi Rem Utama
  - (b) Kondisi Rem Parkir
3. Badan Kendaraan
  - (a) Kondisi Kaca Depan
4. Ban
  - (a) Kondisi Ban Depan
  - (b) Kondisi Ban Belakang
5. Perlengkapan
  - (a) Sabuk Keselamatan Pengemudi

Unsur Teknis Penunjang :

1. Pengukur Kecepatan
2. Sistem Penerangan
  - (a) Lampu Posisi Depan
  - (b) Lampu Posisi Belakang
3. Badan Kendaraan
  - (a) Kaca Spion
  - (b) Penghapus Kaca
  - (c) Klakson
4. Kapasitas Tempat Duduk
5. Perlengkapan Kendaraan
  - (a) Ban Cadangan
  - (b) Segitiga Pengaman
  - (c) Dongkrak
  - (d) Pembuka Roda
  - (e) Lampu Senter
6. Tanggap Darurat
  - (a) Pintu Darurat
  - (b) Jendela Darurat
  - (c) Alat Pemukul/Pemecah Kaca

Semua aspek aspek tersebut sangat penting untuk di cek kelayakannya agar dapat memenuhi standar kelayakan jalan. Apabila salah satu aspeknya tidak terpenuhi, maka dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran uji kelayakan bus. Setiap pelanggaran yang ada akan langsung terinput ke dalam aplikasi Sikenal ini dan langsung terhubung ke provinsi. Data mengenai bus dapat diakses oleh pemerintah setiap daerah guna evaluasi terhadap bus.

Terkait cara pengaplikasian Sistem Kerja Terminal setiap bus harus memiliki sebuah kartu yang dinamakan *smartcard* yang mana prosedur penggunaannya hanya dengan cara menempelkan kartu pada *barcode gate* seperti pada penggunaan *e-toll*, dan secara otomatis semua data bus akan ter input di dalam layar monitoring yang ada di terminal tersebut diantaranya berapa jumlah penumpang yang diturunkan, berapa jarak bus yang sudah ditempuh selama perjalanan sebelumnya sampai di kedatangan terminal tersebut. Dalam hal ini waktu keberangkatan dan kedatangan juga tercatat didalam aplikasi. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan *smartcard* ini masih diberlangsungkan faktor oleh dua terminal Tipe B di Provinsi Jawa Timur yaitu Terminal Anjuk Ladang dan Terminal Kertajaya sebagai acuan kedepannya karena kedua terminal tersebut merupakan terminal terbaik di tingkat nasional.

### **Faktor Penghambat Dalam Uji Kelayakan Bus Antarkota**

Uji kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai syarat bus diperbolehkan melakukan perjalanan tentunya memiliki hambatan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Uji kelayakan bus ini dilakukan setiap enam bulan sekali. Dua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap standar kelayakan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan sebagai syarat bus layak jalan. Dalam menjalani praktek uji kelayakan, khususnya dalam uji kelayakan teknis ini masih kurang terlaksana dengan baik di seluruh terminal karena belum semua terminal di Provinsi Jawa Timur memiliki penguji maupun PPNS. Sistem penguji dan PPNS merupakan orang terlatih

yang telah dipilih oleh pemerintah melalui beberapa tes. Hal ini tentunya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang ada, apakah dapat memenuhi atau tidak memenuhi. Kurangnya penguji dan PPNS di setiap terminal Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan uji kelayakan bus. Waktu pelaksanaan yang kurang menjadi faktor penghambat uji kelayakan bus. Faktor yang menyebabkan kurangnya waktu pelaksanaan uji kelayakan bus adalah karena jadwal keberangkatan atau kedatangan bus yang tidak sesuai dengan jadwal. Inilah yang sampai sekarang masih menjadi masalah pemerintah.

Padatnya jadwal bus dibarengi dengan jumlah terminal yang diatur menjadi masalah bagi pemerintah. Beberapa bentuk pelanggaran ringan apabila dilakukan terus menerus akan mengakibatkan ricuhnya sistem keluar masuk bus. Dalam hal jumlah penumpang atau kapasitas penumpang dalam bus, banyak sekali ditemukan adanya jumlah penumpang yang melebihi kapasitas bus. Pelanggaran semacam ini banyak terjadi di waktu malam hari karena tenaga kerja pembantu pemerintah dalam terminal sedikit lengah. Kenyataannya pelaksanaan uji kelayakan bus yang seharusnya dilaksanakan setiap enam bulan sekali tidak selalu dapat dilaksanakan secara rutin di seluruh terminal. Inilah yang menjadi masalah internal bagi sistem pemerintahan khususnya di Dinas Perhubungan. Mengingat uji kelayakan bus merupakan salah satu fungsi kontrol dalam transportasi berarti hal ini seharusnya menjadi program rutin per enam bulan sekali. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap bus. Memang dalam pelaksanaannya pasti terdapat kekurangan dan hambatan yang harus dievaluasi baik dari segi pemerintahan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi setiap setelah selesai melaksanakan uji kelayakan bus dan dibuka oleh pemerintah pusat dan penguji atau PPNS terminal yang ada. Penyampaian informasi, keluhan, dan hambatan di setiap terminal pasti berbeda apalagi melihat struktur masyarakatnya yang berada di kabupaten dan/atau kota. Meskipun pada kenyataannya masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, namun bus menjadi alternatif kendaraan umum yang cenderung diminati oleh masyarakat.

Banyaknya faktor penghambat yang ada menjadikan pelaksanaan uji kelayakan bus ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Banyak sekali ditemukan pelanggaran berupa kericuhan sesama penumpang hanya karena masalah sepele, seperti rebutan kursi penumpang. Padahal jika pelaksanaan pengangkutan dan kapasitas bus berjalan normal, tidak ada satu orang penumpang pun yang tidak mendapatkan kursi. Hal ini sesuai dengan jenis pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas yakni kelebihan jumlah penumpang dalam bus. Biasanya hal ini dikarenakan adanya keinginan uang tambahan yang dinilai dapat untung lebih besar dan lebih banyak. Sebenarnya pelanggaran ini sudah menjadi catatan yang bersejarah bagi Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun. Setelah di evaluasi, masih terdapat adanya preman yang berada di area terminal. Tentunya karena hal itu, masyarakat atau penumpang menjadi risih dan tidak enak karena takut dengan preman. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pihak lain seperti Satpol PP yang bertugas menertibkan lingkungan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penerapan aplikasi Sikenal berbasis website melalui smartcard mempermudah kinerja terminal untuk mengontrol mobilitas bus di 27 terminal tipe B di Jawa Timur walaupun hanya dua terminal yang baru menggunakan serta mengaplikasikan smartcard. Hasil dari penerapan aplikasi Sikenal berbasis website sudah dirasakan manfaatnya oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam menggunakan moda transportasi darat.



Kedepannya pemerintah akan memaksimalkan aplikasi berbasis website tersebut guna lebih meningkatkan fungsi kinerja dalam menunjang alur transportasi darat khususnya Bus untuk mempermudah masyarakat dalam bermobilitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Shiddiq Sugiono. 2021. Peran *E-Government* dalam membangun *Society 5.0*. *Jurnal Inovasi Kebijakan Tangerang Selatan*
- Hasil Sensus Penduduk. 2020. Badan Pusat Statistik. bps.go.id
- Lena Ellitan. 2020. Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. *Jurnal Maksipreneur Management Study Program, Widya Mandala Catholic University Surabaya*.
- Kusumawardani, Rusmanita. 2018. Integritas pegawai pengendalian operasional terminal anjuk ladang Kabupaten Nganjuk (Studi pada Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk). *Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*.
- Dinda Afidah Fitriani. 2016. Uji kelayakan bus antar kota dalam trayek (studi di dinas perhubungan Kota Malang Dan Terminal Landungsari). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Apa Itu Era Society 5.0 dan Apa Perbedaannya dengan Era Industri 4.0? <https://barki.uma.ac.id/2022/01/11/apa-itu-era-society-5-0-dan-apa-perbedaannya-dengan-era-industri-4-0/>